

PERKEMBANGAN UTANG INDONESIA

Utang merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan sebagai salah satu bentuk pembiayaan ketika APBN mengalami defisit dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (*debt refinancing*).

Kenaikan jumlah nominal utang pemerintah berasal dari:

1. Akumulasi utang di masa lalu (*legacy debts*) yang memerlukan *refinancing* yang cukup besar
2. Dampak krisis ekonomi tahun 1997-1998:
 - Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - BLBI dan rekapitulasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari *asset-recovery* digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
3. Pembiayaan defisit APBN.

Tujuan dari utang antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk pembiayaan kembali utang jatuh tempo, dengan biaya yang optimal dan risiko yang terkendali.
2. Mendukung pengembangan pasar SBN domestik untuk mendukung terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid yang berdampak pada peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang.
3. Meningkatkan akuntabilitas public sebagai bagian dari pengelolaan utang pemerintah yang transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan pengelolaan utang diantaranya:

1. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman.
2. Mengupayakan peningkatan efisiensi biaya utang dalam jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal.
3. Mengoptimalkan bauran mata uang (*currency mix*) dalam penerbitan SBN dengan mengutamakan penerbitan dalam mata uang Rupiah, sedangkan penerbitan SBN valas dilakukan sebagai komplementer.
4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik
5. Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif antara lain melalui *cash buyback* dan *debt switch* untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar serta implementasi *Asset Liability Management (ALM)* dalam upaya untuk menjaga keseimbangan makro.
6. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan sukuk yang berbasis proyek dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah.
7. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman sebagai alternative instrument pembiayaan.

Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Ketentuan Perundang-undangan:

- ❖ Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;
- ❖ Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;
- ❖ Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- ❖ Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- ❖ Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- ❖ Peraturan Pemerintah No. 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- ❖ Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah;
- ❖ Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; dan
- ❖ Peraturan Presiden No 82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN.

Mengatur a.l, prinsip-prinsip *good governance*:

- Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR;
- Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang;
- Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal; dan
- Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang.

Tabel.1 Perkembangan Utang Dalam APBN 2012-2017 (dalam Triliun Rupiah)

	LKPP					APBN
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pendapatan Negara dan Hibah / Revenues and Grants	1,338.11	1,438.89	1,550.49	1,508.02	1,555.93	1,750.28
I. Penerimaan Dalam Negeri / Domestic Revenues	1,332.32	1,432.06	1,545.46	1,496.05	1,546.95	1,748.91
1. Penerimaan Perpajakan / Tax	980.52	1,077.31	1,146.87	1,240.42	1,284.97	1,498.87
2. Penerimaan Bukan Pajak / Non Tax	351.80	354.75	398.59	255.63	261.98	250.04
II. Hibah / Grants	5.79	6.83	5.03	11.97	8.99	1.37
B. Belanja Negara / B. Expenditures	1,491.41	1,650.56	1,777.18	1,806.52	1,864.28	2,080.45
I. Belanja Pemerintah Pusat / Central Government	1,010.56	1,137.16	1,203.58	1,183.30	1,154.02	1,315.53
a. Bunga Utang / Interest Payments	100.52	113.04	133.44	156.01	182.76	221.19
- Dalam Negeri / Domestic Currency	70.22	98.71	118.84	141.90	167.75	205.48
- Luar Negeri / Foreign Currency	30.29	14.32	14.60	14.11	15.01	15.72
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa / Transfers to Regions	480.65	513.26	573.70	623.14	710.26	764.93
III. Suspend / III. Suspend	0.21	0.14	(0.10)	0.07	-	-
C. Keseimbangan Primer / Primary Balance	(52.78)	(98.64)	(93.25)	(142.49)	(125.58)	(108.97)
Rasio Defisit APBN thd PDB (%)	(1.9)	(2.3)	(2.3)	(2.6)	(2.5)	(2.4)
D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) / Budget Surplus (Deficit) (A-B)	(153.30)	(211.67)	(226.69)	(298.49)	(308.34)	(330.17)
E. Pembiayaan / Financing	175.16	237.39	248.89	323.11	334.50	330.17
I. Pembiayaan Utang / Debt	140.79	223.22	255.73	380.92	403.01	384.69
II. Pembiayaan Non-Utang / Non Debt	34.37	14.17	(6.84)	(57.81)	(68.51)	(54.52)
Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan / Financing Surplus (Deficit)	21.86	25.72	22.20	24.61	26.16	(0.00)

Keterangan:

- Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/P) DJA
- Untuk Tahun 2012-2016 terdapat reklasifikasi pengelompokan Penerusan Pinjaman dari pembiayaan utang menjadi pembiayaan non utang

Pembiayaan melalui utang meningkat cukup tinggi di tahun 2015 sebesar 48,94 persen. Sedangkan di tahun 2016, peningkatan pembiayaan melalui utang menurun persentasenya yaitu hanya sebesar **5,80** persen. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan pembiayaan defisit melalui utang sebesar **4,55** persen.

Keseimbangan primer tertinggi selama 6 tahun terakhir terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar **142,49** triliun Rupiah. Keseimbangan primer merupakan penerimaan Negara dikurangi belanja, diluar pembayaran bunga utang. Kondisi ini mencerminkan penerimaan Negara sudah tidak mampu membiayai belanja Negara.

**Tabel.2 Perkembangan *Cashflow* Pembiayaan 2012-2017
(dalam miliar Rupiah)**

	LKPP					APBN
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kebutuhan Pembiayaan / Financing Needs [a=b+c+g]	(357,337)	(393,596)	(476,104)	(587,761)	(725,739)	(648,128)
Defisit / Budget Deficit [b]	(153,301)	(211,673)	(226,692)	(298,495)	(308,341)	(330,168)
Pembayaran Utang / Debt Repayment [c=d+e+f]	(174,421)	(160,421)	(237,030)	(226,261)	(322,549)	(263,138)
Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara / Bond Redemptions and Buybacks [d]	(123,193)	(103,075)	(174,468)	(160,125)	(253,540)	(197,042)
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri / Foreign Loan Amortization [e]	(51,115)	(57,204)	(62,421)	(65,995)	(68,726)	(65,082)
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri / Domestic Loan Amortization [f]	(113)	(141)	(141)	(141)	(283)	(1,013)
Pembiayaan Non utang / Non Debt Financing Needs [g]	(29,616)	(21,502)	(12,382)	(63,005)	(94,849)	(54,823)
Sumber Pembiayaan / Financing Sources [h=+h]	379,195	419,317	498,305	612,374	751,902	648,128
Utang / Debt [j=+m+p]	315,214	383,643	492,762	607,177	725,558	647,828
Penerbitan SBN, Bruto / Government Securities Issuance, Gross [j=k+h]	282,897	327,748	439,097	522,382	660,799	597,035
Penerbitan SBN Domestik / Domestic [k]	227,174	269,013	353,093	409,361	518,353	477,335
Penerbitan SBN Valas / Foreign [l]	55,724	58,735	86,003	113,021	142,446	119,700
Penarikan Pinjaman LN / Foreign Loan Disbursements [m=n+o]	31,403	55,280	52,575	83,821	63,424	48,293
Pinjaman Program / Program Loans [n]	15,003	18,426	17,777	55,085	35,325	13,300
Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat / Project Loans to Central Government [o]	16,400	36,853	34,798	28,737	28,099	34,993
Penarikan Pinjaman DN / Domestic Loan Disbursements [p]	913	616	1,091	974	1,335	2,500
Non Utang / Non Debt [q]	63,981	35,674	5,543	5,196	26,343	300
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan / Financing Surplus (Deficit) [r=a+h]	21,858	25,722	22,201	24,613	26,162	0
Net Cash Flow Pembiayaan / Net Financing Cash Flows [s=t+x]	175,158	237,395	248,893	323,108	334,503	330,168
Utang Neto / Net Debt [t=u+v+w]	140,793	223,222	255,732	380,916	403,009	384,690
Surat Berharga Negara / Government Securities [u]	159,704	224,673	264,629	362,257	407,259	399,993
Pinjaman Luar Negeri / Foreign Loans [v]	(19,711)	(1,925)	(9,847)	17,827	(5,302)	(16,789)
Pinjaman Dalam Negeri / Domestic Loans [w]	800	474	950	832	1,052	1,487
Non Utang Neto / Net Non Debt [x]	34,366	14,172	(6,840)	(57,808)	(68,506)	(54,523)

Keterangan:

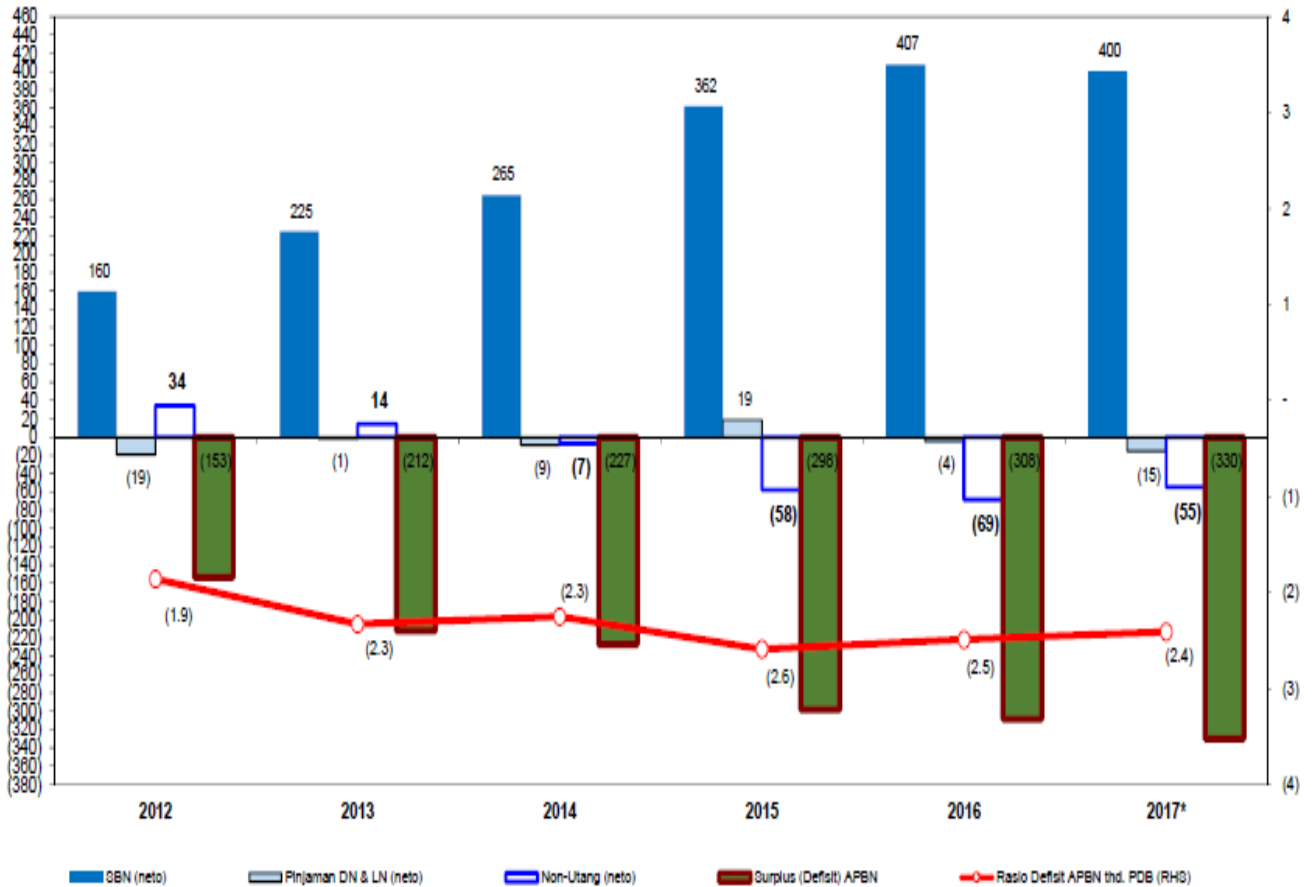
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) DJBn, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/P) DJA

Untuk Tahun 2012-2016 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dari Pembiayaan utang menjadi pembiayaan non utang

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan pembayaran utang pada APBN tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, baik yang jatuh tempo dan *buyback* Surat Berharga Negara maupun pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri masing-masing sebesar **22,28** persen serta **5,30** persen. Hanya pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar **257,95** persen.

Pinjaman proyek Pemerintah Pusat pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar **23,53** persen dibandingkan tahun 2016. Pinjaman Dalam Negeri pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebesar **41,35** persen.

**Grafik.1 Perkembangan SBN (Neto), Pinjaman DN & LN (neto) 2012-2017
(% thd PDB) (triliun Rupiah)**



Sumber:

*) LKPP (DJBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu)

**) untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokan Penerusan Pinjaman dari Pembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang.

Sejak tahun 2005, SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN. Kenaikan SBN periode 2011-2016, antara lain untuk *refinancing* utang lama yang jatuh tempo, dan *refinancing* dilakukan dengan utang baru yang mempunyai *terms* dan kondisi yang lebih baik.

Pembiayaan melalui SBN tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp407 triliun. Sedangkan rasio defisit APBN terhadap PDB mengalami penurunan sejak tahun 2016. Sedangkan nilai surplus (defisit) konstan meningkat sejak tahun 2012 hingga tahun 2017.

**Tabel.3 Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan 2012-2017
(dalam triliun Rupiah)**

JENIS PEMBIAYAAN	LKBA 999.01					2017		
	2012	2013	2014	2015	2016*)	APBN	Realisasi Per Juli	
							Nominal	%
TOTAL	32.32	50.05	52.62	82.66	61.99	50.79	21.38	42.1%
<i>equivalent dlm miliar USD</i>	<i>3.34</i>	<i>4.51</i>	<i>4.28</i>	<i>5.95</i>	<i>4.66</i>	<i>3.82</i>	<i>1.60</i>	
1. Pinjaman Program	15.00	18.39	17.77	55.08	35.32	13.30	10.90	81.9%
<i>equivalent dlm miliar USD</i>	<i>1.55</i>	<i>1.55</i>	<i>1.48</i>	<i>3.89</i>	<i>2.65</i>	<i>1.00</i>	<i>0.81</i>	
a. World Bank	8.62	9.60	9.22	30.22	14.73	-	8.62	79.1%
b. A D B	5.81	4.90	4.86	19.29	13.28	-	-	0.0%
c. JAPAN	-	3.89	-	-	-	-	-	0.0%
d. FRANCE	-	-	1.24	2.15	1.40	-	2.28	20.9%
e. I D B	0.57	-	-	-	-	-	-	0.0%
f. GERMANY	-	-	2.44	3.42	5.91	-	-	0.0%
2. Pinjaman Proyek	16.40	31.12	33.76	26.80	25.41	34.99	9.88	28.2%
<i>equivalent dlm miliar USD</i>	<i>1.70</i>	<i>2.91</i>	<i>2.71</i>	<i>2.00</i>	<i>1.91</i>	<i>2.63</i>	<i>0.74</i>	
3. Pinjaman Dalam Negeri	0.91	0.54	1.09	0.78	1.26	2.50	0.60	23.9%
<i>equivalent dlm miliar USD</i>	<i>0.09</i>	<i>0.05</i>	<i>0.09</i>	<i>0.06</i>	<i>0.09</i>	<i>0.19</i>	<i>0.04</i>	

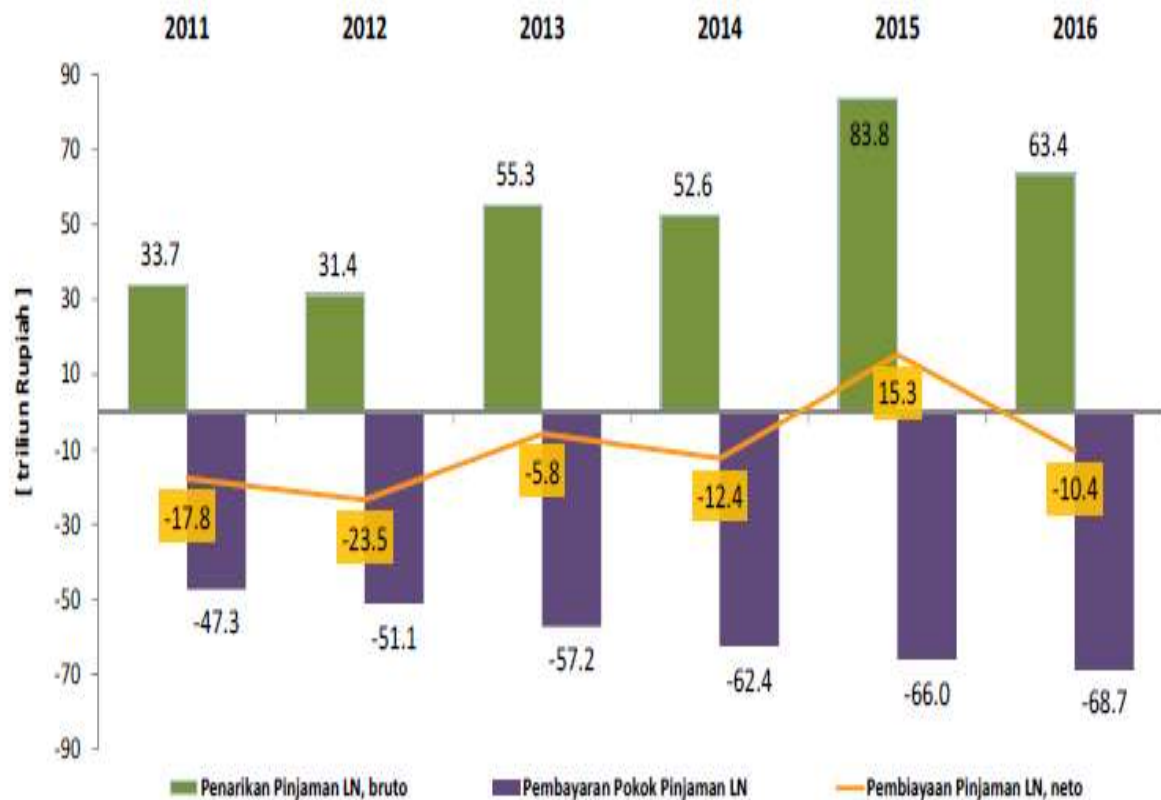
Sumber/catatan:

*) Angka sementara

-) APBN (DJA-Kemenkeu)

Pinjaman program tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp55,08 triliun selama 6 tahun terakhir. Sumber pinjaman program terbesar berasal dari World Bank. Sedangkan untuk pinjaman proyek terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp34,99 triliun. Pinjaman dalam negeri juga tertinggi di tahun 2017 sebesar Rp2,50 triliun.

Grafik.2 Perkembangan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011-2016



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penarikan Pinjaman LN, bruto	33.75	31.40	55.28	52.58	83.82	63.42
Pembayaran Pokok Pinjaman LN	(47.32)	(51.12)	(57.20)	(62.42)	(65.99)	(68.73)
Pembiayaan Pinjaman LN, neto	(17.80)	(23.46)	(5.81)	(12.35)	15.25	(10.42)

Keterangan:

-Angka LKPP-sumber DJPBN

Penarikan pinjaman LN bruto tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp83,82 triliun. Pada tahun 2015 juga terjadi pembiayaan pinjaman LN, neto tertinggi sebesar Rp15,25 triliun.

Tabel.4 Posisi Utang Pemerintah Pusat Periode 2012-2017

	2012	2013	2014	2015	2016 ^{#)}	2017			
						Juni	Juli ^{###)}		
	Angka dalam Triliun Rupiah						Nominal		%
Total Utang Pemerintah Pusat	1,977.71	2,375.50	2,608.78	3,165.13	3,515.46	3,706.52	3,779.98	100.0%	
a. Pinjaman	616.61	714.44	677.56	755.12	734.85	727.02	734.98	19.4%	
1). Pinjaman Luar Negeri	614.81	712.17	674.33	751.04	729.71	721.83	729.58	19.3%	
Bilateral *)	359.80	383.53	334.62	340.63	315.07	310.92	313.72	8.3%	
Multilateral **)	230.23	288.29	292.33	360.04	368.92	367.33	371.21	9.8%	
Komersial ***)	24.37	40.00	47.15	50.20	45.61	42.73	43.70	1.2%	
Suppliers ***)	0.41	0.35	0.24	0.17	0.10	0.85	0.95	0.0%	
2). Pinjaman Dalam Negeri	1.80	2.27	3.22	4.08	5.13	5.18	5.40	0.1%	
b. Surat Berharga Negara	1,361.10	1,661.05	1,931.22	2,410.01	2,780.61	2,979.50	3,045.00	80.6%	
Denominasi Valas ^{##)}	264.91	399.40	456.62	658.92	766.58	792.06	838.89	22.2%	
Denominasi Rupiah	1,096.19	1,261.65	1,474.60	1,751.09	2,014.03	2,187.44	2,206.12	58.4%	
	Angka dalam Milliar US Dolar								
Total Utang Pemerintah Pusat	204.52	194.89	209.71	229.44	261.64	278.29	283.72	100.0%	
a. Pinjaman	63.76	58.61	54.47	54.74	54.69	54.58	55.17	19.4%	
1). Pinjaman Luar Negeri	63.58	58.43	54.21	54.44	54.31	54.20	54.76	19.3%	
Bilateral *)	37.21	31.47	26.90	24.69	23.45	23.34	23.55	8.3%	
Multilateral **)	23.81	23.65	23.50	26.10	27.46	27.58	27.86	9.8%	
Komersial ***)	2.52	3.28	3.79	3.64	3.39	3.21	3.28	1.2%	
Suppliers ***)	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.06	0.07	0.0%	
2). Pinjaman Dalam Negeri	0.19	0.19	0.26	0.30	0.38	0.39	0.41	0.1%	
b. Surat Berharga Negara	140.76	136.27	155.24	174.70	206.95	223.70	228.55	80.6%	
Denominasi Valas ^{##)}	27.39	32.77	36.71	47.76	57.05	59.47	62.97	22.2%	
Denominasi Rupiah	113.36	103.51	118.54	126.94	149.90	164.23	165.59	58.4%	
Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US\$)	9,670	12,189	12,440	13,795	13,436	13,319	13,323		

Catatan:

- Termasuk semi *commercial* #) Angka LKPP *audited*
- ** Beberapa termasuk semi *concessional* ##) Termasuk SUN Valas Domestik
- *** Seluruhnya termasuk *commercial* ###) Tidak Termasuk *accrued interest* sebesar Rp49,6 triliun

Terjadi pergeseran pembiayaan dari pinjaman menjadi Surat Berharga Negara(SBN), yaitu sebesar 80,6 persen dari total utang Pemerintah Pusat. Pembiayaan melalui SBN tertinggi terjadi di tahun 2017, yaitu berdasarkan realisasi per Juli 2017 telah mencapai angka Rp3.045 triliun. SBN dengan denominasi Rupiah saat ini masih mendominasi jumlahnya yaitu sebesar 58,4 persen.

Tabel.5 Posisi Surat Berharga Negara 2012-2017

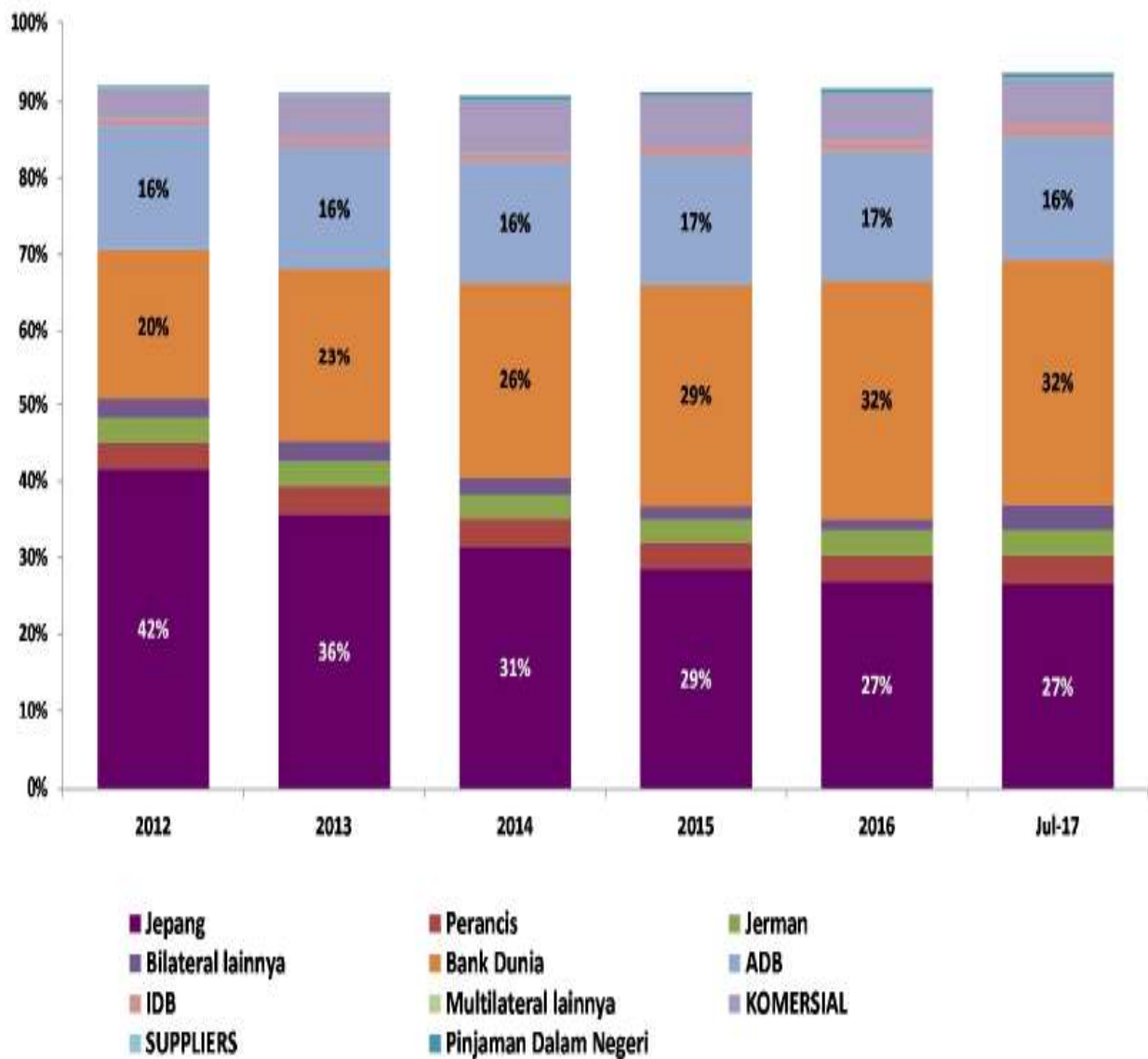
SURAT BERHARGA NEGARA	Dec'12	Dec'13	Des'14	Des'15	Dec-2016	31-May-17	30-Jun-17	31-Jul-17
A. Dapat Diperdagangkan	1,085,173	1,394,652	1,666,576	2,120,762	2,540,107	2,706,711	2,744,298	2,809,802
1. Denominasi Rupiah	820,266	995,252	1,209,960	1,461,846	1,773,279	1,926,531	1,952,234	1,970,913
a. Surat Utang Negara (SUN)	757,231	908,078	1,099,257	1,302,610	1,527,570	1,636,517	1,654,810	1,668,153
1) Surat Perbendaharaan Negara	22,820	34,050	39,950	42,950	41,040	81,600	80,450	82,750
2) Obligasi Negara Tanpa Kupon	1,263	-	-	-	-	-	-	-
3) Obligasi Negara Fixed Rate ¹⁾	610,393	751,273	945,963	1,162,916	1,407,456	1,485,752	1,505,195	1,516,238
4) Obligasi Negara Variable Rate	122,755	122,755	113,344	96,743	79,075	69,165	69,165	69,165
b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	63,035	87,174	110,704	159,236	245,708	290,014	297,424	302,759
1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ²⁾	62,840	78,541	99,969	150,221	238,008	269,464	272,374	278,839
2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah	195	8,633	10,735	9,015	7,700	20,550	25,050	23,920
2. Denominasi Valuta Asing	264,907	399,400	456,616	658,917	766,829	780,180	792,064	838,890
a. SUN Valas Global (dalam juta US\$)	22,950	26,950	28,650	35,150	37,750	36,750	36,750	38,750
b. SUN Valas Domestik (dalam juta US\$)	-	190	540	1,040	1,240	200	200	200
c. SBSN Valas (dalam juta US\$)	2,650	4,150	5,000	7,000	9,500	12,500	12,500	12,500
d. SUN Valas (dalam juta JPY)	155,000	155,000	155,000	255,000	355,000	355,000	455,000	455,000
e. SUN Valas (dalam juta EUR)	-	-	1,000	2,250	5,250	5,300	5,300	6,300
B. Tidak Dapat Diperdagangkan	275,927	266,403	264,642	289,248	240,748	237,016	235,203	235,203
a. Surat Utang kepada Bank Indonesia	240,144	234,870	229,054	222,642	197,547	193,815	192,121	192,121
b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement	-	-	-	22,434	-	-	-	-
c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI dan Sukuk Tabungan (ST)	35,783	31,533	33,197	36,697	39,282	39,282	39,282	39,282
d. SPNS/ Private Placement	-	-	-	5,084	-	-	-	-
e. SBR002	-	-	2,391	2,391	3,919	3,919	3,799	3,799
TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B)	1,361,101	1,661,055	1,931,218	2,410,011	2,780,855	2,943,727	2,979,500	3,045,005
- Asumsi Kurs (IDR/US\$1)	9,670	12,189	12,440.000	13,795.000	13,436.000	13,321.000	13,319.000	13,323.000
- Asumsi Kurs (IDR/JPY1)	111.97	116.17	104.25	114.52	115.40	119.89	120.01	120.62
- Asumsi Kurs (IDR/EUR1)	-	-	15,133.27	15,069.68	14,161.55	14,886.23	14,874.67	15,641.21

Sumber: Kementerian Keuangan

SBN yang dapat diperdagangkan mendominasi pasar SBN di Indonesia dibandingkan dengan SBN tidak dapat diperdagangkan. SBN yang dapat diperdagangkan mencetak penjualan tertinggi pada 31 Juli 2017 sebesar Rp2.809.802 triliun. SBN yang dapat diperdagangkan berdenominasi Rupiah lebih tinggi jumlahnya dibandingkan yang berdenominasi valuta asing. Peningkatan perdagangan SBN yang dapat diperdagangkan terjadi cukup signifikan sejak Bulan Desember 2012 hingga saat ini.

Sedangkan SBN yang tidak dapat diperdagangkan mencetak nilai transaksi tertinggi terjadi pada Bulan Desember 2015 yaitu sebesar Rp289.248 triliun. SBN yang tidak dapat diperdagangkan tertinggi jumlahnya dalam bentuk Surat Utang kepada Bank Indonesia, namun nilainya sejak Desember 2012 mengalami penurunan hingga saat ini.

Grafik. 3 Posisi Pinjaman Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur 2012-2017



Sumber: Kementerian Keuangan

Pinjaman luar negeri dari multilateral (World Bank, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang. Oleh karena itu Jepang lebih mendominasi sebagai kreditur terbesar bagi Indonesia.

Pada tahun 2012 hingga saat ini, jumlah pinjaman dari Jepang mengalami trend menurun. Kreditur terbesar adalah Bank dunia, hal ini terjadi sejak tahun 2016 hingga saat ini.

Tabel.6 Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi 2012-2017**(miliar Rupiah)**

	2012	2013	2014	2015	2016 ^{#)}	2017 ^{*)}
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	17,369	19,124	17,352	17,973	15,991	15,941
Pertambangan & Penggalian	7,052	7,138	6,081	6,165	5,861	5,917
Industri Pengolahan	14,916	14,027	11,004	10,211	8,485	7,911
Listrik, Gas & Air Bersih	49,532	51,488	44,840	46,490	46,736	47,213
Bangunan	112,227	122,628	110,010	113,530	104,742	103,142
Perdagangan, Hotel & Restoran	5,276	4,801	3,671	3,155	2,383	2,116
Pengangkutan & Komunikasi	20,176	20,764	17,735	18,794	17,894	18,101
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan	98,963	127,770	134,589	194,955	214,885	221,370
Jasa-jasa	168,519	214,405	223,140	243,825	234,585	232,562
Sektor Lain	122,575	132,295	109,136	100,022	83,285	80,705
TOTAL	616,605	714,441	677,557	755,119	734,846	734,977

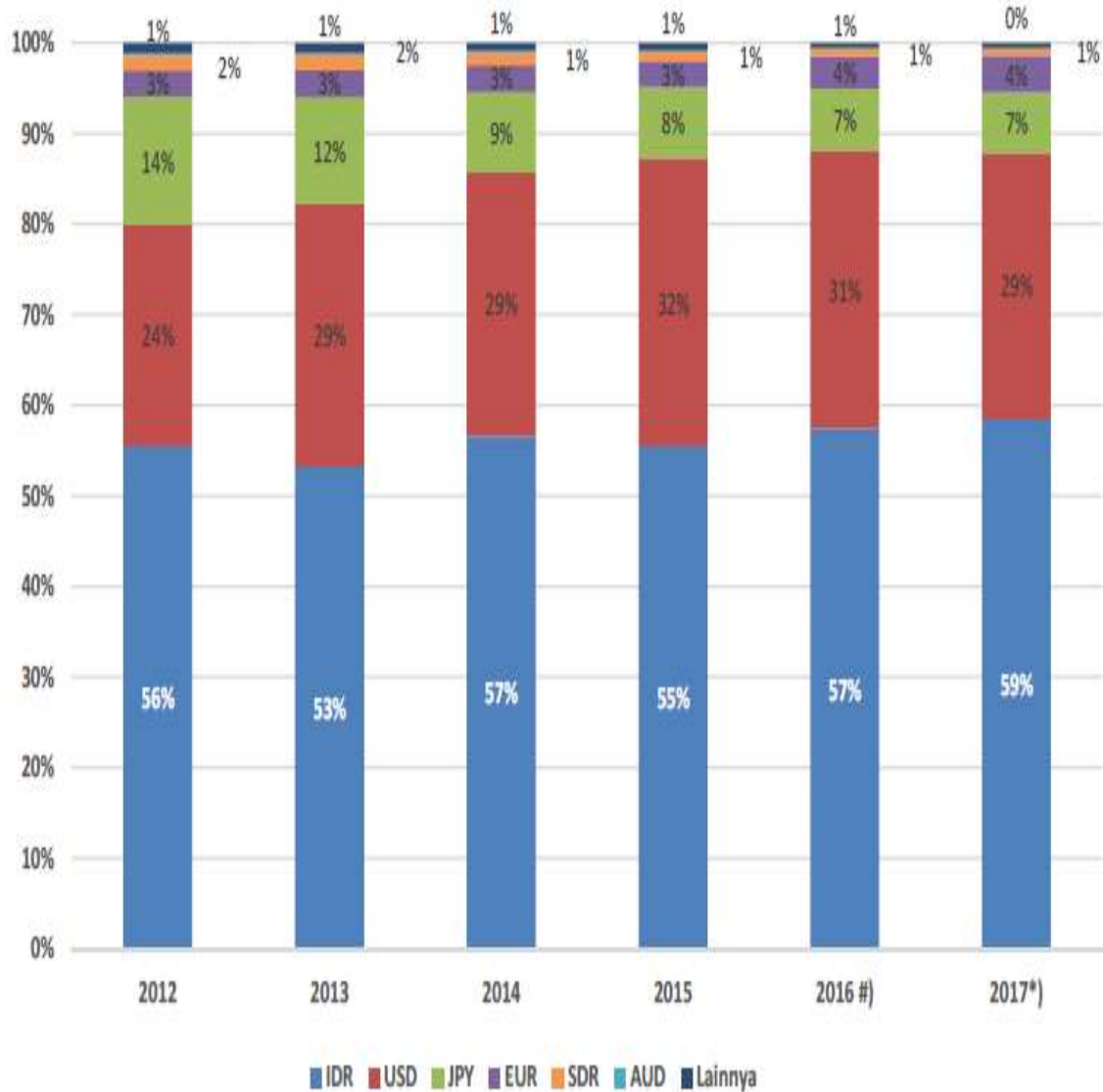
Sumber: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia

Sektor jasa-jasa melakukan pinjaman lebih besar dari sektor lainnya. Alokasi pinjaman terhadap sektor jasa-jasa tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp243.825 miliar.

Sektor yang mendapat alokasi pinjaman dengan tren meningkat pada tahun 2017 yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, serta jasa keuangan.

Sedangkan sektor yang mengalami penurunan melakukan pinjaman sejak tahun 2012 hingga saat ini adalah perdagangan, hotel dan restoran.

Grafik.4 Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama 2012-2017



Catatan:

*) Data per tanggal 31 Juli 2017, #) Angka LKPP audited

Posisi utang pemerintah masih didominasi utang dengan denominasi IDR yang semakin meningkat jumlah di tahun 2017 menjadi 59 persen. Utang Pemerintah Pusat dalam denominasi USD mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 2 persen dibandingkan tahun 2016. Sedangkan SDR sejak tahun 2014 mengalami stagnan nilainya hingga tahun 2017 sebesar 1 persen.